

## DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2018*. Diakses dari : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Belajar Pajak : Ada Apa dengan Pengisian Lampiran SPT Tahunan OP*.(t.thn.). Diakses dari : <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=97>
- Jatuh Tempo Penyetoran dan Pelaporan Pajak*.(2019). Diakses dari : <https://news.ddtc.co.id/jatuh-tempo-penyetoran-dan-pelaporan-pajak-16055>
- Jenis Formulir SPT Tahunan*.(2018). Diakses dari : <https://www.online-pajak.com/spt-tahunan-adalah>
- Ketentuan dan Batas Waktu Pembetulan SPT Pajak*.(t.thn.). Diakses dari : <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/ketentuan-dan-batas-waktu-pembetulan-spt-pajak/>
- Mardiasmo.(2016).*Perpajakan*.Jogjakarta:CV.Andi Offset
- Objek Pajak Penghasilan*.(t.thn.). Diakses dari : <https://www.pajak.go.id/id/objek-pph>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015*.(2015). Diakses dari : <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-36pj2015>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018*.(2018). Diakses dari : <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/pp-nomor-23-tahun-2018/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*.(2013). Diakses dari : <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2046%20Tahun%202013.pdf>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan*.(2017). Diakses dari : <https://pajaksite.files.wordpress.com/2017/11/lampiran-se-65-pj-20131.pdf>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.(2017). Diakses dari : <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.(2008). Diakses dari : <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Waluyo.(2017).*Perpajakan Indonesia*.Jakarta:Salemba Empat



**7.48%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #10307822

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari masyarakat guna membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018), penerimaan negara dari sektor perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar Rp 1.618,1 triliun dari jumlah pendapatan negara dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sisanya terdiri dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assessment, dimana setiap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan berbagai kesalahan yang tidak disengaja atau bahkan sengaja dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, institusi pemungut pajak mengambil peran sebagai pengawas yang dapat melakukan penegakan hukum, diantaranya dengan pemeriksaan atau penyidikan pajak. Dalam perpajakan, wajib pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT. **58 SPT** digunakan wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilan baik yang